



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Uang Negara Rp 3,9 M Diselamatkan

KEPAHIANG - Sebanyak Rp 3,9 miliar uang negara, berhasil diselamatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) selama tahun 2019. Jumlah tersebut berasal dari 7 perkara Tipikor yang telah masuk dalam tahapan penyelidikan, dengan jumlah penuntutan sebanyak 18 perkara, dan yang telah dieksekusi sebanyak 13 terdakwa.

Diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Rusydi Sastrawan, SH, MH, bahwa dari 18 perkara yang ditun-

tut, sebanyak 6 perkara dari Kejari Kepahiang dan 12 perkara yang dilimpahkan dari Polres Kepahiang.

"Untuk jumlah eksekusi ada 13 terdakwa, sebagian besar sudah mendapatkan putusan inkracht dari Pengadilan Tipikor Bengkulu. Ada juga saat ini yang masih dalam proses persidangan atau sedang bersiap mengikuti tahapan persidangan," beber Rusydi, kemarin (18/12).

Rusydi juga menambahkan, dari Rp 3,9 miliar yang berhasil diselamatkan tersebut, terdiri dari uang denda senilai Rp 100 juta, uang pengganti perkara sebesar Rp 3,7 miliar, dan uang rampasan atas perkara senilai Rp 47,8 juta.

"Saat ini uang negara yang berhasil diselamatkan tersebut sudah dikem-

balikan ke kas negara, sebagai bahan pertanggungjawaban atas penyelesaian perkara yang telah dilakukan," tambah Rusydi.

Terkait ke depannya, Rusydi mengatakan, masih ada beberapa perkara yang menyebabkan kerugian negara, sedang dalam penyelidikan pihak Kejari Kepahiang. Hanya saja terkait perkara apa saja tersebut, Rusydi belum mau membeberkannya. Namun ia memastikan seluruh proses penyelidikan bisa diselesaikan paling lambat pada awal 2020 mendatang.

"Ya, memang ada beberapa perkara yang masih penyelidikan. Namun kita belum bisa beberkan perkara apa saja itu. Karena saat ini anggota kita masih bekerja menuntaskannya," ungkapnya.

Untuk tahun 2020 mendatang, Rusydi mengatakan, sama seperti tahun sebelumnya, pihaknya selaku pengacara negara tetap akan memberikan pendampingan kepada seluruh instansi pemerintahan dan jajarannya, khususnya dalam tata kelola keuangan negara, agar tidak bertabrakan dengan aturan hukum yang berlaku.

"Seperti tahun 2019 ini, kita ketahui sebagian dari perkara yang kita tangani adalah soal Dana Desa (DD). Ke depannya kita akan lebih gencar lagi melakukan pengawasan dan pendampingan, khususnya kepada pemerintahan desa, supaya ke depannya tidak ada lagi desa yang harus berurusan dengan hukum, lantaran perkara penyalahgunaan dana desa," demikian Rusydi. (sly)